



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023  
KABUPATEN BANTUL**





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V : Penutup.

## Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah;
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
  1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Renja Dinas Kesehatan;
  3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Renja Dinas Sosial;
  8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
  10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. Renja Dinas Perhubungan;
  15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Renja Dinas Pariwisata;
  18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
  19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
  20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
  2. Renja Kapanewon Sanden;
  3. Renja Kapanewon Kretek;
  4. Renja Kapanewon Pundong;
  5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
  6. Renja Kapanewon Pandak;
  7. Renja Kapanewon Pajangan;
  8. Renja Kapanewon Bantul;
  9. Renja Kapanewon Jetis;
  10. Renja Kapanewon Imogiri;
  11. Renja Kapanewon Dlingo;



12. Renja Kapanewon Banguntapan;
  13. Renja Kapanewon Pleret;
  14. Renja Kapanewon Piyungan;
  15. Renja Kapanewon Sewon;
  16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
  17. Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

BURATI BANTUL,

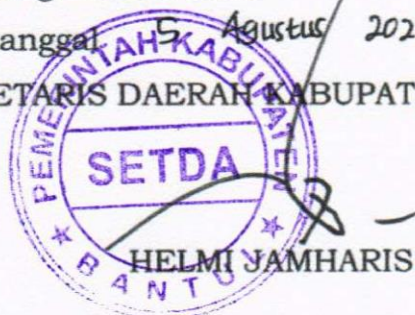
ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023





**Rencana Kerja (Renja)  
Kapanewon Pandak  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2023**

---



# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pandak menyusun Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Panda Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

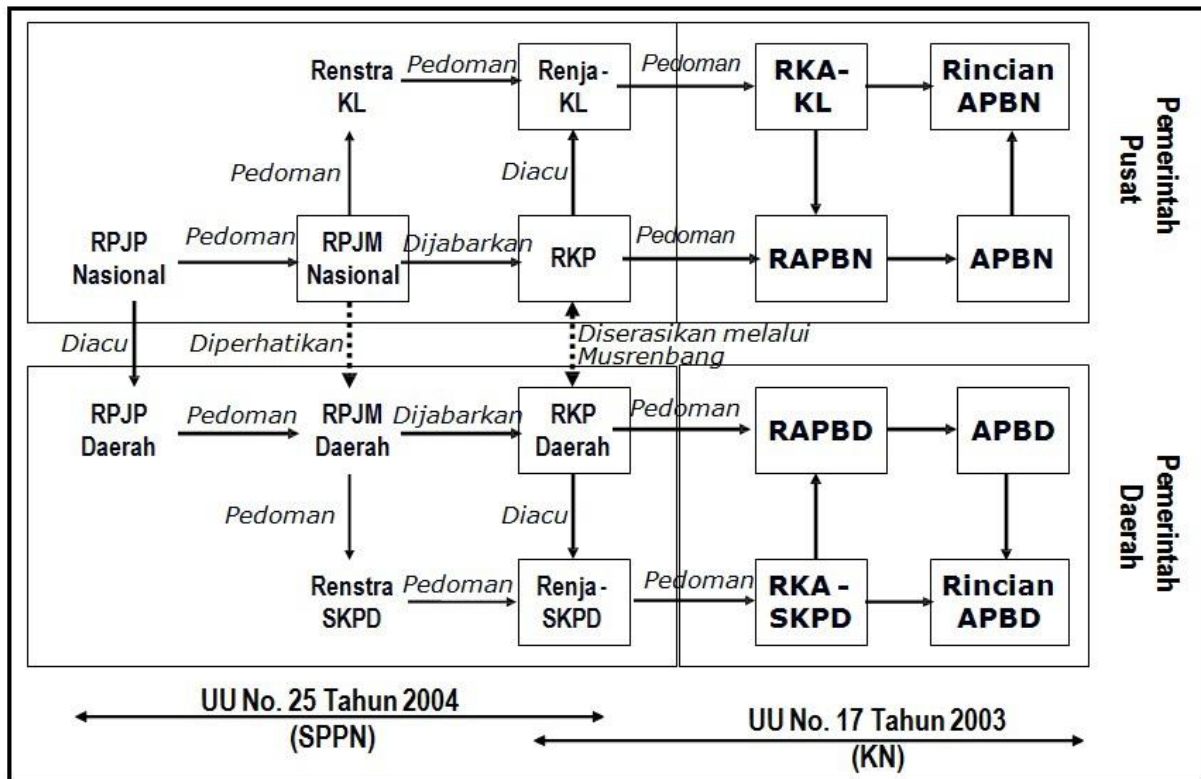
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya



saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).



- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 );

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan RKA Kapanewon Pandak Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Pandak Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



**BAB II.**  
**HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**  
**2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	85 angka	85 angka	100%
		capaian nilai evaluasi kinerja	79 angka	79 angka	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai evaluasi kinerja	79 Angka	79 Angka	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Renstra 2021 - 2026	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85 persen	85 persen	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji PNS	14 kali	14 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85 angka	85 angka	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	11 jenis	11 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	14 jenis	14 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	15 jenis	15 jenis	100%
Alat/Bahan kegiatan kantor lainnya		2 jenis	2 jenis	100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	25254 lembar	25254 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	25 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
		laporan hasil rapat koordinasi	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah	20 OP	20 OP	100%
		perjalanan dinas luar daerah	87 persen	87 persen	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	85 angka	85 angka	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	170 lembar	170 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air	12 bulan	12 bulan	100%
		Belanja listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		belanja telephone	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan/bibit tanaman	7 jenis	7 jenis	100%
		Bahan lainnya	2 jenis	2 jenis	100%
		Obat	2 jenis	2 jenis	100%
		Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor	11 jenis	11 jenis	100%
		ATK	22 jenis	22 jenis	100%
		Bahan Kimia	22 jenis	22 jenis	100%
		Perabot Kantor	13 jenis	13 jenis	100%
		Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat	5 jenis	5 jenis	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%	
	Laporan Kebersihan Kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%	
	Laporan Kegiatan administrasi Umum	12 dokumen	12 dokumen	100%	
	Laporan Kegiatan pelayanan Masyarakat	24 dokumen	24 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Penyediaan Makan minum pelayanan kepada Masyarakat	12 bulan	12 bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)	7 unit	7 unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	9 unit	9 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	90 angka	92 angka	102%
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	95 persen	95 persen	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	95 persen	95 persen	100%
		laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 angka	92 angka	102%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan masyarakat	2 jenis	2 jenis	100%
		jenis layanan yang diberikan	16 jenis	16 jenis	100%
		masyarakat yang dilayani	6000 orang	6000 orang	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	88 persen	88 persen	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	88 persen	88 persen	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan kelompok	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan Pendampingan Lomba	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Promosi produk masyarakat	0 Dokumen	0 dokumen	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2 dokumen	2 dokumen	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kcamatan	100 persen	100 persen	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kegiatan FKDM/PK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Monev Potensi Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pendampingan TMMD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 persen	100 persen	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	100%
		laporan kegiatan penguatan Forkompimkap	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		pelaksanaan upacara	6 Kali	6 Kali	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Laporan Kegiatan FKUB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan telah seluruhnya memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	NIHIL	NIHIL

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan tepat waktu Kerjasama yang baik antara para stakeholder
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi setiap bulan, triwulan dan tiap semester Capaian kinerja, keuangan dan barang terdokumentasi dalam



No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sistem IT (aplikasi E- SAKIP ROPK,)
		Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;	
	Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP Pelayanan;	
	Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;;	
	Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan;	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
3	<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <p><b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b></p> <p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Tersusunnya usulan pembangunan desa;</p> <p>Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;</p> <p>Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.</p> <p>Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;</p> <p>Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;</p> <p>Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.</p>
4	<p><b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <p><b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b></p> <p>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;</p> <p>Terjalinnnya komunikasi intensif pengampu trantibum.</p>
5	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b></p> <p><b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b></p>	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;



8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.
10. Pengisian lowongan Jabatan Struktural sehingga beban pekerjaan yang diampu oleh Pelaksana Tugas dapat berkurang dan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.
11. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					tahun 2021		Catatan Analisis
	Tahun 2016	Tahun 2017	tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	target	realisasi	
IKM Kecamatan	79,54%	82,92%	84,57%	90%	102,22%	90%	102,22%	
Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75%	80%	97,75%	100%	100%	90%	111,11%	
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70%	92.7%	84%	100%	48.72%	100%	72.02%	Realisasi tidak bisa memenuhi target dikarenakan anggaran usulan kegiatan tergantung kepada OPD pengampu kegiatan

*Keterangan:*

*\*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi*

Sesuai pencapaian IKUKapanewon Pandak Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pajangan yang tidak memenuhi target adalah:
  - a. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewonan.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dana/anggaran pada OPD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap banyaknya usulan pembangunan dari desa.
- b. Belum sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah Kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
- c. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

- 1) IKM Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya pendamping program IUKM
- b. Ketersediaan peralatan elektronik
- c. Tersedianya ATK
- d. Adanya banner alur pelayanan
- e. Ruang pelayanan yang memadai.

- 2) Rata rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya program pemberdayaan masyarakat
- b. Adanya dukungan swadaya masyarakat
- c. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, melalui pendampingan desa



3) Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat yang dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK, Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pandak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kapanewon Pandak Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Pandak. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Keterbatasan jumlah dan kapasitas ASN Kapanewon
Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

## Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

<b>Peluang</b>	<b>Tantangan</b>
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Merupakan wilayah yang termasuk kriteria miskin tertinggi di wilayah Kabupaten Bantul
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	Masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, dan minimnya fasilitas publik yang ramah anak, difabel dan lansia.
Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kapasitas pegawai	Kompetensi dan profesionalitas aparatur belum memadai.
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pandak pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat.
4. Peningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat guna penurunan tingkat kemiskinan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pandak Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	Kapanewon Pandak	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</b>	<b>100 Persen</b>	<b>116.040.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	Kapanewon Pandak	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</b>	<b>100 Persen</b>	<b>116.040.000</b>	
	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>		<b>Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>82 persen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>		<b>Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>82 persen</b>	<b>50.000.000</b>	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen	<b>50.000.000</b>	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen	<b>50.000.000</b>	
	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>66.040.000</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>66.040.000</b>	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	<b>66.040.000</b>	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	4 Dokumen	66.040.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kapanewon Pandak	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>80 angka</b>	<b>3.179.799.764</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kapanewon Pandak	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>80 angka</b>	<b>3.179.799.764</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>6.900.000</b>	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>6.775.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	3.450.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.325.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	3.450.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.450.000	
			Dokumen Keuangan	29 Dokumen							
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.630.811.764</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.629.811.764</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	1.718.614.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bu	2.584.811.764	
			Pembayaran TPP	12 Dokumen	865.997.764	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorarium pengelola keuangan. BMD dan kepegawaian	132 OB	46.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	2.000.000	
						<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	100 Persen	1.362.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1.362.500	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>95 persen</b>	<b>144.578.950</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>95 persen</b>	<b>144.341.450</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik	12 Jenis	4.613.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.613.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK Bahan Komputer	31 Jenis 3 Jenis	15.068.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	13.343.450	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	17 Jenis	9.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak	3 Jenis	12.367.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.367.500	
			Penggandaan	41000							
			Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	2 jenis							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	35 dokumen	95.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	95.600.000	
			laporan pelaksanaan kegiatan	5 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perjalanan dinas dalam daerah	125 op							
			perjalanan dinas luar daerah	24 op							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	1 dokumen	5.230.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.230.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1 dokumen	1.487.500	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>70.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	3 jenis	20.000.000	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 jenis	70.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>166.991.074</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>166.991.074</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	260	2.520.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran listrik	12 bulan	32.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.450.000	
			Pembayaran telepon	12 bulan							



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	14.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	16.920.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 Dokumen	117.621.074	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	117.621.074	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dokumen							
			Klapan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 Dokumen							
			Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	12 Dokumen							
			Penyediaan makanan dan minuman kantor untuk pelayanan umum kantor	12 bulan							
			Pemenuhan pelayanan umum kantor	1 kali							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>160.517.976</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>96 persen</b>	<b>160.517.976</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	97.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	97.320.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Unit	63.197.976	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	63.197.976	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>96 Persen</b>	<b>37.900.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>96 Persen</b>	<b>37.900.000</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>22.650.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>22.650.000</b>	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dokumen	22.650.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	7.975.000	
			Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	6 dokumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	14.675.000	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>15.250.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>15.250.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey kepuasan masyarakat	2 dokumen	15.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan pemerintahan	2 Laporan	15.250.000	
			Jumlah masyarakat yang dilayani	6500							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>84 persen</b>	<b>224.935.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>84 persen</b>	<b>224.935.000</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>84 persen</b>	<b>117.435.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>84 persen</b>	<b>117.435.000</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita acara penyusunan perencanaan pembanguna partisipatif	1 Dokumen	13.975.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga kemasyarakatan	13.975.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan bidang sosial	7 dokumen	103.460.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20 Laporan	103.460.000	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>84 persen</b>	<b>107.500.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>84 persen</b>	<b>107.500.000</b>	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	7 dokumen	107.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	6 Laporan	107.500.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>96 persen</b>	<b>134.850.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>96 persen</b>	<b>134.850.000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>96 persen</b>	<b>134.850.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>96 persen</b>	<b>134.850.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan monev petensi bencana	2 dokumen	134.850.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	5 Laporan	134.850.000	
			Laporan upaya penyelenggaraan tibum	4 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan upacara	12 Dokumen							
			Laporan kegiatan FPRD	1 Dokumen							
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8.400.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kapanewon Pandak	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8.400.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8.400.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8.400.000</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	60 orang	8.400.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 orang	8.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					3.701.924.764					3.701.924.764	



## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon ;

4. Mengimplementasikan Budaya Pemerintahan Satriya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
6. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastruktur dan SDM berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026. maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target Tahun 2023</b>
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

## **BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et				
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					100.000.000			0				
2	2	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>					100.000.000			0				
2	2	0	5.0		<b>Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya</b>					100.000.000			0				
2	2	0	5.0	1	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Presentasi Kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	100.000.000	Dana Keistimewaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100 persen	0
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					48.222.000			66.040.000				
4	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>					48.222.000			66.040.000				
4	0	0	5.0		<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>					48.222.000			66.040.000				
4	0	0	5.0	0	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	48.222.000	Dana Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Perse n	66.040.000
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	0				<b>KECAMATAN</b>					3.168.118.902			3.828.204.764				
7	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					2.853.038.152			3.384.994.764				
7	0	0	2.0		<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					6.000.000			6.480.000				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	80 angka	7 Dokumen	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.480.000	
7	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan	80 angka	5 Laporan	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>2.418.700.372</b>			<b>2.668.553.764</b>			
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	capaian kinerja pengadminist rasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	80 angka	21 Orang/bul	an100 persen	2.359.590.372	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.609.703.764	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengadminist rasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	80 angka	12 Dokumen	100 persen	54.110.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	53.850.000	
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	an capaian kinerja a pengadminis trasi keu <sup>an</sup> keuangan perangkat daerah an	Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan	80 angka	22 Laporan	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
						ulanen/Seme ste SKPD												
7	0	0	2.0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1.362.500</b>				<b>1.500.000</b>			
7	0	0	2.0	0	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 persen	4 Laporan	100 Persen	1.362.500	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 perse n	1.500.000	
7	0	0	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>111.946.780</b>				<b>182.930.876</b>			
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	4.286.030	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	6.500.000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	13.840.500	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	22.642.976	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	8.461.500	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	12.000.000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	8.496.250	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	14.387.900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	1 Dokumen	100 persen	1.375.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000	
7	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	40 Laporan	100 persen	69.540.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	114.000.000	
7	0	0	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	1 Dokumen	100 persen	4.460.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6.000.000	
7	0	0	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	1 Dokumen	100 persen	1.487.500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.400.000	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>31.000.000</b>				<b>50.000.000</b>		
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	7 Unit	100 persen	31.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50.000.000	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>146.565.920</b>				<b>200.345.129</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	12 Laporan	100 persen	28.700.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	53.000.000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Laporan	100 persen	14.660.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	15.800.000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Laporan	100 persen	103.205.920	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	131.545.129	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>137.462.580</b>				<b>275.184.995</b>		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	7 Unit	100 persen	91.695.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	134.630.000	
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	3 Unit	100 persen	45.767.580	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Capaian nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angk a	140.554.995	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>28.035.000</b>				<b>51.850.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
7	0	0	2.0	1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							20.275.000				<b>36.100.000</b>	
7	0	0	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	91 Persen	4 Laporan	100 persen	5.600.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	5.600.000
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	91 Persen	4 Dokumen	100 persen	14.675.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	30.500.000
7	0	0	2.0	0	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>							7.760.000				<b>15.750.000</b>	
7	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	91 Persen	2 Laporan	100 persen	7.760.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	15.750.000
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							143.635.750				<b>238.110.000</b>	
7	0	0	2.0	0	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							69.375.750				<b>125.610.000</b>	
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	8 Lembaga	84 persen	8.750.750	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	19.150.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et			
7	013	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	20 Laporan	84 persen	60.625.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	106.460.000
<b>7</b>	<b>013</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>74.260.000</b>				<b>112.500.000</b>				
7	013	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	4 Laporan	84 persen	74.260.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	112.500.000
<b>7</b>	<b>014</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>136.850.000</b>				<b>134.850.000</b>				
<b>7</b>	<b>014</b>	<b>7.03</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>136.850.000</b>				<b>134.850.000</b>				
7	014	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	5 Laporan	100 Persen	136.850.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	84 Persen	134.850.000
<b>7</b>	<b>015</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>6.560.000</b>				<b>18.400.000</b>				
<b>7</b>	<b>015</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>6.560.000</b>				<b>18.400.000</b>				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Targ et	
7 0 0 2.0 0	0 1 5 1 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelengga raan Pemerintah n Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	capaian kinerja penyelenggar aan pemerintah n umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 Persen	60 Orang	100 persen	6.560.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Cakupan Stabilitas Penyelengga raan Pemerintah n Umum	100 Perse n	18.400.000
<b>TOTAL</b>										<b>3.316.340.9 02</b>			<b>3.894.244.764</b>	

**BAB V.**  
**PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Pandak

.....

